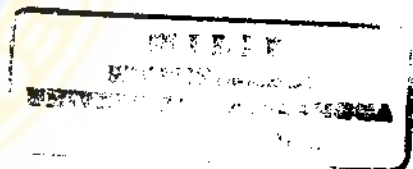


TESIS

UPAYA MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK

(Studi Alokasi dan Distribusi APBD Kabupaten Tuban
Tahun Anggaran 2001-2005)



NANANG HARYONO, S.IP.

**PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

**UPAYA MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN
MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK**

**(Studi Alokasi dan Distribusi APBD Kabupaten Tuban
Tahun Anggaran 2001-2005)**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Ilmu Sosial
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**

2 Agustus 2007



**Oleh:
NANANG HARYONO, S.IP.
NIM : 090515557.M**

**PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

Lembar Pengesahan

TESIS INTELAIH DISETUJUI

TANGGAL 24 JULI 2007

Oleh

Pembimbing Ketua

Prof. KACUNG MARIJAN, Drs., MA, Ph.D
NIP. 131 836623

Pembimbing

Drs. GITADI TEGAS, M.Si.
NIP. 131 569 363

Mengetahui
Ketua Program Studi

Prof. Dr. LAURENTIUS DYSON P., MA
NIP. 130.937.724

Telah Diuji pada
Tanggal 2 Agustus 2007

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Drs. Krisnugroho, MA

Anggota : 1. Prof. Dr. L. Dyson P., MA

2. Drs. Priyatmoko, MA

3. Drs. Aribowo, MA

4. Prof. Drs. Kacung Marijan, MA, Ph.D

5. Drs. Gitadi Tegas, M.Si.

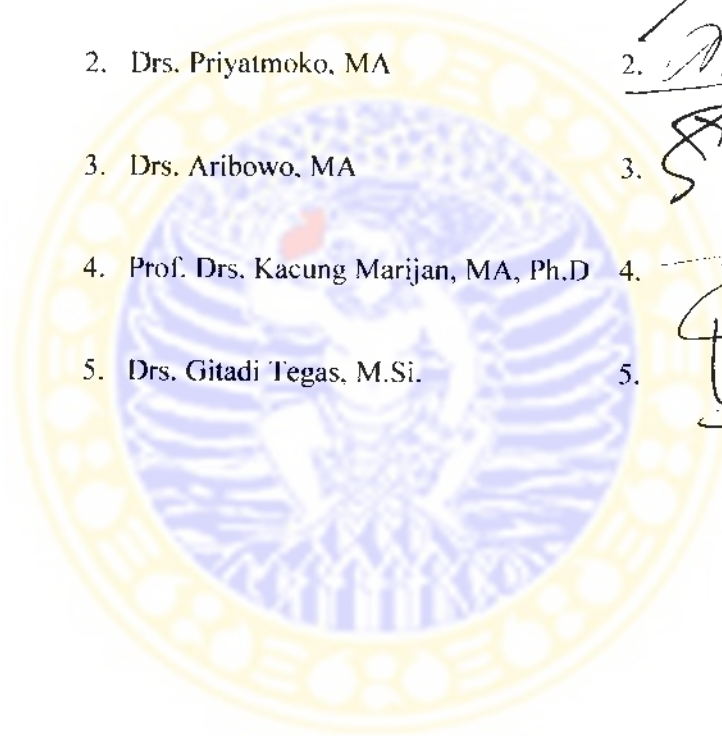
1.

2.

3.

4.

5.



Krisnugroho
L. Dyson P.
Priyatmoko
Aribowo
Kacung Marijan
Gitadi Tegas

Kupersembahkan Tesis ini pada

**Bapak Maskoen, BA dan Ibunda Nanin Suwartini
serta adik Heny Tria Wahyuning Diah
atas doa dan pengorbanan hingga terselesaikannya tesis ini.
Spesial untuk kirei atas kehadirannya dan doa-doa serta
kebersamaan selamanya ...**



KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmad dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Drs. Kacung Marijan, MA, Ph.D, Pembimbing Ketua yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan bimbingan dan saran melalui email. Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Drs. Gitadi Tegas, M.Si., Pembimbing dua yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran kepada penulis.

Dengan terselesaikannya tesis ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga Surabaya: Prof. Dr. H. Fasichul Lisan, MS, Apt.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya: Drs. I. Basis Susilo, MS.
3. Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya: Prof. Dr. Laurentius Dyson Penjalong, MA.
4. Dosen Pembimbing Tesis: Drs. Kacung Marijan, MA, Ph.D dan Drs. Gitadi Tegas, M.Si, atas pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat ilmiahnya.
5. Para Dosen Penguji pada Sidang Usulan Penelitian: Drs. Kacung Marijan, MA, Ph.D, Drs. Priyatmoko, MA, , Drs. Aribowo, MA, Drs. Krisnugroho, MA, dan Drs. Gitadi Tegas S., M.Si; atas pendapat-pendapat ilmiahnya, sebagai penyempurna awal tesis ini.
6. Para dosen pengampu mata kuliah: Prof. Dr. Laurentius Dyson Penjalong, MA, Daniel Th. Sparringa, Ph.D., Drs. Priyatmoko, MA, Drs. Haryadi, MA, Drs. Krisnugroho, MA, Dr. I.B. Wirawan, SU, Drs. Kacung Marijan, MA, Ph.D., Drs. Gitadi Tegas S., M.Si, Dra. Sutinah, MS, Drs.

- Trijoko Sri Haryono, MA, Drs. Edyherry Prihantoro, M.Si, Drs. Doddy S. Singgih, M.Si, dan Drs. H. Herwanto, MA
7. Teman-teman seangkatan (IIS-2005): Abdul Rohman, SHI; Akhmad Hidayat, SHI, SH; Anik Rahmaniah, S.Sos; Autar Abdillah, S.Sn; Beda Ama Agustinus, Drs. S.Sn; Dwi Rachmawati, S.Sos; Imam Pujiarto, S.Sos; Mar'atul Makhmudah, SIP; Marianus G. Kleden, Drs.; Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos; Muh. Ilyas Rolis, S.Ag; Muhammad Afdillah, S.Th.I; Wawan E Kuswandro, S.Sos.; Novita Ambarwati, S.Sos; Rofinus Man, S.Sos; dan Suprayitno, Drs.
 8. Para narasumber penelitian yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, antara lain: Staf Bappeda Kabupaten Tuban, Anggota DPRD Kabupaten Tuban, Staf Kimpraswil Kabupaten Tuban, UPTD di Kabupaten Tuban, Warga dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Tuban, Kontraktor dsb.
 9. Bapak dan Ibu Penulis yang mendorong cepat terselesainya Tesis ini karena beban SPP.
 10. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut berkontribusi terhadap penyelesaian tesis ini: para pegawai di lingkungan Pasca Sarjana Fisip Universitas Airlangga Surabaya, perpustakaan, warnet, dan sebagainya.

Tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan pada tesis ini, maka segala kritik, masukan, akan sangat berharga dan bermanfaat bagi penyempurnaan sebuah karya, bagi ketinggian ilmu pengetahuan.

Surabaya, 2 Agustus 2007

Penulis

RINGKASAN

UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No 6 Tahun 2005 menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung. Rakyat yang pada era sebelumnya hanya menerima Kepala Daerah pilihan Legislatif Daerah berubah menjadi pelaku dan penentu Kepala Daerah. Untuk tujuan mempertahankan kekuasaan Kepala Daerah menggunakan kewenangannya dalam pemerintahan membuat kebijakan publik yang mendukung kepentingan Kepala Daerah.

Kebijakan Publik sering digunakan oleh Kepala Daerah untuk mempertahankan kekuasaannya. Kebijakan-kebijakan yang dipilih dalam skala prioritas pembangunan (renstra kabupaten/kota) merupakan kebijakan yang diupayakan dapat mendukung kepala daerah pada pencalonan periode ke dua. Pada penyusunan APBD alokasi dan distribusi dipilih program yang dapat menyenangkan warga sehingga kepala daerah mendapat simpati dari warganya dengan demikian kebijakan publik yang dibuat oleh kepala daerah adalah untuk *memback up* kebijakan bupati yang akan mencalonkan bupati pada periode ke dua.

Permasalahan seputar pilihan kebijakan publik dan implikasinya pada pilkada dalam politik lokal yang kompleks merupakan sesuatu tema menarik untuk diteliti. Penelitian ini ingin melihat: (1) Bagaimana upaya incumbent mempertahankan kekuasaan melalui kebijakan publik? (2) Sejauhmana upaya incmbent mempertahankan kekuasaan melalui kebijakan publik berhasil? Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian dipilih di Kabupaten Tuban. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung pada informan secara mendalam (*indepth interview*) untuk memperoleh kedalaman data.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa upaya Kepala Daerah mempertahankan kekuasaan melalui kebijakan publik adalah dengan membuat kebijakan publik yang menyenangkan warganya. Kebijakan publik yang dipilih untuk dilaksanakan di Kabupaten Tuban utamanya adalah yang ada dalam renstra diantaranya pembangunan bidang administrasi umum dan pemerintahan, bidang pertanian, bidang pekerjaan umum, bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Empat bidang yang ada dalam renstra diwujudkan dalam pembangunan fisik. Pembangunan yang paling dapat dirasakan warga adalah pembangunan infrastruktur transportasi yang sampai pada pelosok desa. Kebijakan publik yang menjadi unggulan kepala daerah bukan faktor tunggal dalam kemenangan Kepala Daerah incumbent dalam pilkada, masih terdapat faktor lain seperti pemanfaatan birokrasi, politik uang dan sebagainya dalam mendukung kemenangan calon kepala daerah incumbent.

Kata kunci: kebijakan publik, kekuasaan kepala daerah, APBD.

ABSTRACT

UU No. 32 Year 2004 and PP No 6 Year 2005 becoming base in management of election of Direct regional leader. People which at era before all only receiving Legislative Choice regional leader of area turning into Regional Leader determinant and perpetrator. For purpose of maintaining power of Regional Leader apply the authority in government of making policy of public supporting importance of Regional Leader.

Policy Of Public often applied by Regional Leader for maintaining the power. Policys which selected in development priority scales is policy which strived can support regional leader at nomination of second period. At compilation of APBD distribution and allocation selected by program available for pleasing citizen so that regional leader getting sympathy from the citizen is thereby policy of made by public is regional leader is for back up policy of regent which will nominate regent at second period.

Problems of in around choice of policy of the implication and public at pilkada in complex local politics is something theme draw for checked. This research wish to to see: (1) How effort incumbent maintain power through policy of public? (2) How effort incmbent maintain power through policy of public succeed? For replying the problems of researcher apply qualitative approach, research location is selected in Sub-Province Tuban. Primary data is obtained through direct interview at informan exhaustively (indepth interview) to obtain get deepness of data.

Based on the research result obtained by result that striving Regional Leader power through policy of public is with making policy of public pleasing the citizen. Policy of public which selected be achieved in Sub-Province Tuban the core important is the in renstra between his(its development of government and general administrations areas, agriculture area, public work area, health area and educational. Four the area in renstra is realized in construction. Development which very can be felt by citizen is development of transportation infrastructure coming up with countryside. Policy of-public becoming exeeding regional leader is not unique factor in Regional Leader winner incumbent in pilkada, still there are other factor like exploiting of bureaucracy, political of usage and money etc in supporting victory of regional leaders candidates incumbent.

Keyword: *public policy, power of regional leader, APBD.*

DAFTAR ISI

Sampul Depan	I
Sampul Dalam	II
Persyaratan Gelar	III
Persetujuan	IV
Penetapan Panitia Penguji	V
Halaman Persembahan	VI
Kata Pengantar	VII
Ucapan Terimakasih	VIII
Ringkasan	IX
Abstract	X
Daftar Isi	XVI
Daftar Tabel	XIX
Daftar Gambar	XX
Daftar Lampiran	XXI
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Teori	10
1.5.1 Kekuasaan Politik	10
1.5.1.1 Kewenangan dan Legitimasi	12
1.5.1.2 Elit Kekuasaan	17
1.5.2 Kebijakan Publik	24
1.5.3 Birokrasi dan Politik Lokal	31
1.5.4 Manajemen Keuangan Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah	37
1.5.5 Pencitraan Kepala Daerah Melalui Kebijakan Publik	40
1.5.5 Paradigma Yang Digunakan	41

1.6. Metode Penelitian	42
1.6.1. Penetapan Lokasi	43
1.6.2. Fokus Penelitian	44
1.6.3. Informan Penelitian	45
1.6.4. Pengumpulan Data	49
1.6.5. Dimensi Yang Dikaji	52
1.6.6. Analisis Data	53
BAB II	56
KABUPATEN TUBAN	56
2.1. Sejarah Kabupaten Tuban	56
2.2. Kondisi Wilayah	63
2.3. Pemerintah Kabupaten Tuban	68
2.4. Keadaan Geografis	47
2.5. Kondisi Sosial	73
2.5.1 Tingkat Pendidikan	74
2.5.2 Kehidupan Beragama	76
2.5.3 Keadaan Kesehatan	79
2.6. Potensi Ekonomi	81
BAB III	
PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN DAERAH	
KABUPATEN TUBAN	85
3.1. APBD Sebagai Peraturan Daerah dan Penjabaran Restra	86
3.2. Bentuk Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan APBD	105
3.3. Alur Proses Penyusunan APBD	109

3.4	Pihak-Pihak Yang Berpartisipasi dalam Penyusunan RAPBD	112
3.5	Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan Kebijakan Yang Tertuang Dalam APBD.....	117
3.6	Dinamika Penyusunan APBD	127
3.7	Dinamika dalam Penetapan APBD	136
BAB IV		
ANALISIS PRODUK KEBIJAKAN PUBLIK KEPALA DAERAH		
KABUPATEN TUBAN 2001-2005		
		148
4.1.	Alokasi dan Distribusi APBD Kabupaten Tuban 2001	151
4.1.1	Alokasi dan Distribusi Perda No. 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2001.....	152
4.1.2	Alokasi dan Distribusi Perda No. 9 Tahun 2001 tentang Perubahan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2001.....	155
4.1.3	Realisasi Alokasi dan Distribusi Perda No. 6 Tahun 2001 dan Perda No. 9 Tahun 2001	159
4.2	Alokasi dan Distribusi APBD Kabupaten Tuban 2002	
4.2.1	Alokasi dan Distribusi Perda No. 1 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2002	164

4.2.2	Alokasi dan Distribusi Perda No. 24 Tahun 2002 tentang Perubahan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2002	168
4.2.3	Realisasi Alokasi dan Distribusi Perda Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2002 dan Perda Kabupaten Tuban No. 24 Tahun 2002 ..	172
4.3	Alokasi dan Distribusi APBD Kabupaten Tuban 2003	177
4.3.1	Alokasi dan Distribusi Perda Kabupaten Tuban No. 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2003	177
4.3.2	Alokasi dan Distribusi Perda Kabupaten Tuban No. 22 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2003	181
4.3.3	Realisasi Alokasi dan Distribusi Perda Kabupaten Tuban No. 25 Tahun 2002 dan Perda Kabupaten Tuban No. 22 Tahun 2003	185
4.4	Alokasi dan Distribusi APBD Kabupaten Tuban 2004	191
4.4.1	Alokasi dan Distribusi Perda Kabupaten Tuban No. 32 Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2004	192
4.4.2	Alokasi dan Distribusi Perda Kabupaten Tuban No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2004	196

4.4.3	Realisasi Alokasi dan Distribusi Perda Kabupaten Tuban No. 32 Tahun 2003 dan Perda Kabupaten Tuban No. 8 Tahun 2004	200
4.5	Alokasi dan Distribusi APBD Kabupaten Tuban 2005	208
4.5.1	Alokasi dan Distribusi Perda No. 9 Tahun 2004 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2005.....	209
4.5.2	Alokasi dan Distribusi Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2005	213
4.5.3	Realisasi Alokasi dan Distribusi Perda Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2004 dan Perda Kabupaten Tuban No. 8 Tahun 2005 ...	217
BAB V		
	IMPLIKASI ALOKASI DAN DISTRIBUSI APBD 2001-2005 DENGAN PEROLEHAN SUARA PADA PILKADA 2006.....	229
5.1.	Tanggapan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Periode 2001-2006	230
5.2.	Pembangunan 2001-2005 dan Implikasinya Pada Perolehan Suara Pilkada 2006	235
BAB VI		
	UPAYA MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK	244
6.1	Kekuasaan Politik	244
6.1.1	Kewenangan dan Legitimasi	248

6.1.2	Elit Kekuasaan	250
6.2	Kebijakan Publik	252
6.3	Birokrasi dan Politik Lokal	254
6.4	Manajemen Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah	259
6.5	Pembangunan Tahun Anggaran 2001-2005 dan Implikasinya pada Perolehan Suara Pilkada 2006	262
BAB VII		
	PENUTUP	265
7.1	Kesimpulan	265
7.2	Saran	268
7.3	Implikasi.....	269
	DAFTAR PUSTAKA	270
	LAMPIRAN	275

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1.	Lima Tipe Sumber Daya 16
Tabel 2.1	Nama Bupati Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia Di Kabupaten Tuban..... 62
Tabel 2.2	Nama Bupati Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia Di Kabupaten Tuban 63
Tabel 2.3	Luas Daerah dan Presentase Terhadap Luas Kabupaten menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban 65
Tabel 2.4	Jarak Antar Ibukota Kecamatan di Kabupaten Tuban ... 66
Tabel 2.4.1	Jarak Antar Ibukota Kecamatan di Kabupaten Tuban 67 (tabel Lanjutan)
Tabel 2.5	Ibukota Kecamatan dan Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Tuban 70
Tabel 2.6	Proyeksi Penduduk Menurut Kecamatan dan Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Tuban 71
Tabel 2.7	Pencari Kerja Terdaftar, Penempatan dan Lowongan Kerja 72
Tabel 2.8	Tingkat Pendidikan Dibawah Departemen Pendidikan Nasional Perkecamatan di Kabupaten Tuban 75
Tabel 2.9	Tingkat Pendidikan Dibawah Departemen Agama Perkecamatan di Kabupaten Tuban 76
Tabel 2.10	Tempat Peribadatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Tuban 2005 77
Tabel 2.11	Jumlah Pondok Pesantren, Santri di Kabupaten Tuban 2005 78
Tabel 2.12	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Posyandu 2005 80
Tabel 2.13	Tenaga Kesehatan dan Dukun di Kabupaten Tuban 2005 81

Tabel 2.14	Banyaknya Industri Pengolahan Besar dan Sedang di Kabupaten Tuban 2005	83
Tabel 2.15	Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Produksi Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga di Kabupaten Tuban 2005	84
Tabel 3.1	Perolehan Kursi di DPRD Kabupaten Tuban	140
Tabel 4.1	Realisasi Persebaran Alokasi dan Distribusi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2001 dan Perda No. 9 Tahun 2001	161
Tabel 4.2	Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten Tuban Tahun 2000 dan 2001	162
Tabel 4.3	Kondisi Jalan Kabupaten Tuban Tahun 2001	163
Tabel 4.4	Realisasi Persebaran Alokasi dan Distribusi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berdasarkan Perda Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2002 dan Perda Kabupaten Tuban No. 24 Tahun 2002 .	174
Tabel 4.5	Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten Tuban Tahun 2001 dan 2002	175
Tabel 4.6	Kondisi Jalan di Kabupaten Tuban Tahun 2002.....	176
Tabel 4.7	Realisasi Persebaran Alokasi dan Distribusi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berdasarkan Perda Kabupaten Tuban No. 25 Tahun 2002 dan Perda Kabupaten Tuban No. 22 Tahun 2003 .	188
Tabel 4.8	Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten Tuban Tahun 2002 dan 2003	189
Tabel 4.9	Kondisi Jalan di Kabupaten Tuban Tahun 2003.....	190
Tabel 4.10	Realisasi Persebaran Alokasi dan Distribusi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum Berdasarkan Perda Kabupaten Tuban No. 32 Tahun 2003 dan Perda Kabupaten Tuban No. 8 Tahun 2004	205
Tabel 4.11	Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten Tuban Tahun 2003 dan 2004	207

Tabel 4.12	Kondisi Jalan Poros Desa di Kabupaten Tuban Tahun 2004	207
Tabel 4.13	Realisasi Persebaran Alokasi dan Distribusi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum Berdasarkan Perda Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2004 dan Perda Kabupaten Tuban No. 8 Tahun 2005	211
Tabel 4.14	Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten Tuban Tahun 2004 dan 2005	223
Tabel 4.15	Kondisi Jalan Poros Desa di Kabupaten Tuban Tahun 2005	224
Tabel 4.16	Ringkasan Alokasi dan Distribusi APBD Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2001-2005 di Kabupaten Tuban	225
Tabel 4.17	Ringkasan Hasil Realisasi Alokasi dan Distribusi APBD Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2001-2005 Pembangunan Jalan Kabupaten di Kabupaten Tuban	226
Tabel 4.18	Ringkasan Hasil Realisasi Alokasi dan Distribusi APBD Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2001-2005 Pembangunan Jalan Poros Desa di Kabupaten Tuban	228
Table 5.1	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2006	240
Table 5.2	Rekapitulasi Realisasi Alokasi dan Distribusi APBD Tahun Anggaran 2001-2005 dengan Perolehan Suara dalam Pilkada di Kabupaten Tuban Tahun 2006	242

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.2	Tiga Elemen Sistem Kebijakan	27
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Tuban	64

